

Education as a Human Right: An Analysis of Its Impact on Social Change and the Legal Framework of Education in Indonesia

Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia: Analisis Dampak terhadap Perubahan Sosial dan Sistem Hukum Pendidikan di Indonesia

Dedi Mulyadi[✉], Sani San Zein

Universitas Suryakencana Cianjur, Indonesia

✉ dedimulyadi53@gmail.com

Submitted: 2024-12-18

Revised: 2025-04-30

Accepted: 2025-04-30

ABSTRACT

This article discusses the application of Education as a Human Right. Human Rights are fundamental human rights that refer to the dignity and worth of God Almighty's creation, which are innate from birth and cannot be violated or abolished by anyone. Education as a human right means that everyone has the right to the supremacy of law without discrimination. Thus, the state is obliged to protect, respect and fulfill its right to education. Based on Law Nomor 20 of 2003 concerning the national education system, there is a government obligation to fulfill the right to education. This obligation means that the state is responsible for providing free and mandatory basic education for school-aged children. This obligation also requires the central and regional governments to be responsible for efforts to make the nation's life smarter which will have a good social impact on society.

Keywords: *education, human, law, rights, social*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang penerapan Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi yang mendasar yang merujuk pada harkat dan martabat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan bawaan sejak lahir dan tidak dapat dilanggar atau dihapuskan oleh siapa pun. Pendidikan sebagai hak asasi manusia berarti bahwa setiap orang berhak atas supremasi hukum tanpa diskriminasi. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi haknya atas Pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terdapat kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas pendidikan. Kewajiban ini mengandung makna bahwa negara bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan dasar gratis dan wajib bagi anak usia sekolah. Kewajiban ini juga mengharuskan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang akan memberikan dampak sosial yang baik untuk Masyarakat.

Kata kunci: hak, hukum, manusia, pendidikan, sosial



PENDAHULUAN

Kewajiban adalah suatu hal yang wajib dipenuhi, dimana biasanya ketika melakukan kewajiban, seseorang dapat memperoleh haknya. Menjadi bagian dari bangsa Indonesia, juga dituntut untuk dapat menggunakan hak dan kewajibannya, yang biasanya di sebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Diskusi tentang hak asasi manusia terjadi di semua bidang kehidupan, termasuk perspektif pendidikan. Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945), salah satu tujuan utama pembentukan dan pendirian Negara Republik Indonesia adalah hak atas Pendidikan.¹

Di Indonesia sendiri sebenarnya telah dicanangkan pendidikan sebagai hak warga negara. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan”.² Dengan adanya undang-undang tersebut Pemerintah Indonesia telah menyatakan pentingnya Pendidikan terhadap seluruh warga negara Indonesia, hal ini juga telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.³

Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat peduli terhadap pelaksanaan Pendidikan.⁴ Pendidikan memberikan kemajuan pemikiran umat manusia, sehingga taraf hidup mereka meningkat. Dalam perkembangannya dari zaman ke zaman Pendidikan berubah menjadi suatu sistem. Suatu sistem pendidikan yang tersusun secara sistematis yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 1, yang menjelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan melalui 3 jalur yaitu Pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan ini satu sama lain saling berkait dan membutuhkan untuk melakukan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.⁵

¹ Fanisyah Salsabila Octavianti, “Implementasi Konvensi Hak Anak Di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan Bagi Pelajar SMA),” *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 23, no. 1 (2023): 30–37, <https://doi.org/10.24036/pedagogi.v23i1.1476>.

² Ari Dwi Handoyo and Zulkarnaen, “Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata Di Indonesia,” *Prosiding Seminar Nasional* 1, no. 1 (2019): 21–24, <https://bimawa.uad.ac.id/wp-content/uploads/Paper-Seminar-Nasional-2.pdf>.

³ Anwar Hidayat, “Kesenjangan Sosial Terhadap Pendidikan Sebagai Pengaruh Era Globalisasi,” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 2, Nomor 1 (2019): 15–25, <https://doi.org/10.36805/jjih.v2i1.400>.

⁴ Fitria Nur Auliah Kurniawati, “Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi,” *Academy of Education Journal* 13, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765>.

⁵ Ryan Indy, “Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara,” *Holistik, Journal Of Social and Culture* 12, no. 4 (2019): 1–18, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/25466>.

Dalam strategi pendidikan nasional yang melibatkan ketiga jalur Pendidikan tersebut bertujuan agar SDM Indonesia dapat bersaing dalam dunia kerja global, paling tidak harus mengacu atau mengunggulkan sebagian bidang, yang dapat menjadi penentu suatu kemajuan bangsa atau negara yaitu: penguasaan inovasi (45%), penguasaan jaringan (25%), penguasaan teknologi (20%), dan penguasaan kekayaan sumber daya alam hanya (10%). Maka pendidikan Indonesia harus lebih menekankan pada 3 penguasaan yaitu, penguasaan inovasi, jaringan dan teknologi di samping pendapatan sumber daya alam yang melimpah ini.⁶ Hal ini tentu ditujukan untuk perbaikan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan negara lain dan hal lain yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.⁷

Namun, meskipun sudah di amanatkan dalam undang-undang mengenai Hak dan kewajiban menempuh Pendidikan minimal 12 tahun bagi setiap warga negara Indonesia, masih banyak Masyarakat yang mengacuhkan dan tidak menganggap penting Pendidikan, seperti yang tertera dalam data yang di himpun oleh pusat data dan statistik Pendidikan RI menerangkan angka putus sekolah di Indonesia masih cukup tinggi, terutama yang berada di wilayah Jawa Barat. Berikut data putus sekolah yang ada di Jawa Barat dari tahun 2017 hingga tahun 2019:

Tabel. 1. Angka Putus Sekolah 2017-2019

No.	Tahun	Tingkat						Total
		I	II	III	IV	V	VI	
1	2017-2018	854	474	389	404	408	1.067	3.596
2	2018-2019	1.814	530	462	433	615	2.218	6.072

Sumber: statistic.data.kemdikbud.go.id

Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa angka putus sekolah dari tahun 2017/2018 ke tahun 2018/2019 angka putus sekolah melonjak tajam hingga mencapai 2000 kasus lebih.⁸ Dan pada tahun 2022-2023 data dari **Kemendikbud** (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sepanjang tahun tersebut jumlah angka putus sekolah tetap tinggi. Berikut data angka putus sekolah 2022-2023:

⁶ Zainal Abidin, "Peluang Dan Tantangan Mea: Kerjasama Pendidikan Indonesia Di Kawasan Asean" 01 (2019): 29–39.

⁷ Angga Angga et al., "Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Kabupaten Garut," *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 5877–89, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3149>.

⁸ Rahayu, "Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Siswa SD," *Jurnal Kreatif: Jurnal Kependidikan Dasar*, 2016, 115–19, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kreatif/article/view/27831>.

Tabel. 2. Angka Putus Sekolah 2022-2023

No.	Tahun	Tingkat				Total
		SD	SMP	SMA	SMK	
1	2022-2023	40.632	13.716	10.091	12.404	76.843

Menurut **Badan Pusat Statistik** Fenomena putus sekolah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keterbatasan ekonomi, keadaan geografis yang kurang menguntungkan, keterbatasan akses menuju ke sekolah, jarak sekolah yang jauh atau minimnya fasilitas pendidikan di suatu daerah.⁹ Ini menunjukkan bahwa banyak hal yang harus diperbaiki untuk menekan angka putus sekolah tersebut.

Oleh karena itu, penelitian tentang Hak pendidikan dan perubahan sosial sangat relevan untuk dilakukan di Indonesia saat ini. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana pemenuhan hak Pendidikan di Indonesia saat ini. Serta bagaimana Pendidikan dapat membawa dampak baik terhadap perubahan sosial yang terjadi di Masyarakat.

Sebelumnya, terdapat penelitian terdahulu terkait Peran Pendidikan dan dampaknya terhadap perubahan sosial, penelitian tersebut berjudul "*Pendidikan dan Perubahan Sosial (Studi Masyarakat Nelayan Pulau Karampuang Kabupaten Mamuju*" oleh Ahmad Sawali, Kaharuddin, Lukman Ismail dan Nurdevi Bte Abdul.¹⁰ Yang dapat disimpulkan bahwa Pendidikan memiliki dampak besar terhadap perubahan sosial di Pulau Karampuang, meskipun penting, tidak semua warga dapat mengakses Pendidikan karena berbagai faktor. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Pendidikan dalam perubahan sosial di komunitas nelayan, di pulau Karampuang. Namun, penelitian tersebut kurang dalam memberikan rekomendasi atau implikasi praktis dari temuan penelitian, dengan rekomendasi yang jelas akan membantu pembaca, dalam mengaplikasikan hasil penelitian kedalam kebijakan atau program Pendidikan yang lebih baik. Selain itu, Adapun penelitian lain mengenai Peran Pendidikan dan dampaknya terhadap perubahan sosial, berjudul "*Analisis Perubahan Sosial di MTS YPAK Cigugur : Tinjauan terhadap Lembaga Pendidikan dalam transformasi Sosial Masyarakat*".¹¹ Oleh Dede Mulyana, Galang Pratama dan Hilmy Farhani Ali. Simpulan dari penelitian ini adalah Pendidikan memiliki peranan penting dalam menghadapi perubahan sosial dan Pembangunan Masyarakat, Melalui Pendidikan individu dapat

⁹ Badan Pusat Statistik, "Badan Pusat Statistik," 2017, <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>.

¹⁰ Ahmad Sawali et al., "Pendidikan Dan Perubahan Sosial (Studi Masyarakat Nelayan Pulau Karampuang Kabupaten Mamuju)," *Journal Socius Education* 1, no. 1 (2023): 23–30, <https://doi.org/10.0505/jse.v>.

¹¹ Dede Mulyana and Sudiar, "Analisis Perubahan Sosial Dan Pembangunan Di MTs YPAK Ciguru - Tinjauan Terhadap Peran Lembaga Pendidikan Dalam Transformasi Sosial Masyarakat," *J-STAF (Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah)* 2, no. 2 (2023): 214–29.

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, inovatif, serta relevan dalam menghadapi berbagai fenomena dan masalah yang muncul di Masyarakat. Dengan tujuan yaitu untuk menyoroti peran penting Pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial dan membangun Masyarakat lebih maju khususnya MTS YPAK Cigugur. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada sekolah tertentu, yang mungkin membatasi kemampuan generalisasi temuan pada konteks yang lebih luas.

Dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan ini mempunyai kesamaan, yaitu Pendidikan yang berperan penting di Masyarakat dan memberikan dampak perubahan sosial yang baik untuk masa depan. Namun, cara serta bentuk implikasinya belum terlalu dijelaskan, selain itu hanya berfokus pada wilayah tertentu. Maka dari itu, dalam tulisan dengan judul *“Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia: “Dampaknya terhadap Perubahan Sosial dan Hukum Pendidikan”* akan mengulas lebih dalam mengenai pemenuhan hak Pendidikan beserta hukum yang ada, dan dampak Pendidikan terhadap perubahan sosial yang belum tersampaikan dengan baik diantara kedua penelitian tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research), dengan pendekatan analisis kualitatif. Penelitian Kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang diperoleh untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian.¹² Yaitu terhadap Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia dan Dampaknya terhadap Perubahan Sosial dan Hukum Pendidikan. Sumber-sumber kepuustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila peneliti telah memperoleh kepuustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepuustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian tentang Pendidikan dan dampak sosial.

Pencarian dari literatur ini menggunakan database melalui elektronik yaitu google scholar dengan kata kunci “Pendidikan terhadap perubahan sosial”. Hasil penelusuran dapat menghasilkan 153 artikel penelitian. Dalam tinjauan litertur ini penulis melakukan berbagai kriteria dalam pencarian google scholar yaitu: Artikel yang dicari asli, Penelitian dilakukan dengan rentang waktu yaitu 5 tahun (2019-2023), Artikel penelitian dilaksanakan dengan full-text dalam Bahasa Indonesia

¹² Nizmah Maratos Soleha. Yayan Alpian, M.Pd., Sri Wulan Anggraeni, M.Pd., Unika Wiharti., “Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia,” *Jurusan Teknik Kimia USU* 1, no. 1 (2019): 66–72.

maupun Bahasa Inggris, Mengkaji dari reformasi pendidikan, yang berfokus pada Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia : "Dampaknya terhadap perubahan sosial dan Hukum pendidikan". Dari hasil penelusuran tersebut menghasilkan 18 artikel yang sesuai dalam penelitian artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu dari pilar utama untuk terciptanya masyarakat yang demokratis dan sejahtera. Karena berkat pendidikan yang baik dibukalah kewaskitaan seseorang, keyakinan kemanusiaannya diperkuat, dan akses terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang mampu memberinya kemakmuran dan kesejahteraan. Adanya pemenuhan hak Pendidikan tentu dapat mempengaruhi perubahan sosial.¹³ Selain itu, hak atas Pendidikan di Indonesia juga tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap orang berhak atas pengajaran".¹⁴ Dengan demikian, pendidikan sesungguhnya menjadi sebuah kebutuhan yang tidak hanya dibutuhkan oleh satu individu ataupun kelompok, melainkan menjadi kebutuhan bagi semua orang dalam hal konstruksi dan moralitas dalam kehidupan setiap individu suatu bangsa atau negara.

Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak pendidikan anak. Beberapa upaya yang telah dilakukan termasuk pemberdayaan, pemetaan status anak di wilayah tertentu, program-program pemerintah, serta pemenuhan layanan publik bagi penghayat kepercayaan di kabupaten/kota.¹⁵ Selain dari hal-hal tersebut, berikut juga Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak Pendidikan di Indonesia. Yaitu: (a). Adanya Undang-Undang Pendidikan. (b). Program wajib belajar dua belas tahun. (c). Bantuan sosial dan beasiswa. (d). Peningkatan infrastruktur Pendidikan. (e). Pemberdaya Masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak pendidikan anak, termasuk anak penyandang distabilitas. Upaya ini meliputi sosialisasi, bimbingan teknis kepada satuan pendidikan, dan pemberian layanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk anak penyandang distabilitas.¹⁶

¹³ Sawali et al., "Pendidikan Dan Perubahan Sosial (Studi Masyarakat Nelayan Pulau Karampuang Kabupaten Mamuju)."

¹⁴ Rizky Imran et al., "Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): hal 143.

¹⁵ Imran et al.

¹⁶ Imran et al.

Dengan demikian, Indonesia telah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan hak-hak anak. Akan tetapi, Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pemenuhan hak pendidikan. Berikut faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan dan pemerataan hak Pendidikan di Indonesia.

1. Ketidaksetaraan Regional:

Aksesibilitas terhadap lembaga pendidikan: Daerah-daerah tertentu, khususnya yang terpencil atau berada di luar pusat perkotaan, menghadapi kesulitan dalam menjamin akses terhadap lembaga-lembaga yang memadai.

Kurangnya guru yang berkualitas: Beberapa daerah mungkin mengalami kesulitan dalam menarik dan mempertahankan guru yang berkualitas.

2. Kondisi Ekonomi:

Biaya Pendidikan: Biaya pendidikan, termasuk buku, dan biaya sekolah lainnya, dapat menjadi hambatan untuk keluarga yang keadaan ekonominya lemah.

3. Kurangnya Fasilitas dan Sarana Pendidikan:

Beberapa sekolah mungkin kekurangan fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, atau infrastruktur komputer.

4. Masalah Gender:

Diskriminasi berdasarkan Gender: Perempuan masih menghadapi diskriminasi di beberapa komunitas, dan ada kecenderungan untuk memprioritaskan pendidikan kepada anak laki-laki.

5. Kurangnya Sumber Daya dan Anggaran:

Kurangnya Dana untuk Pendidikan: Terbatasnya anggaran untuk sektor pendidikan dapat menghambat pengembangan dan pemeliharaan lembaga pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum.

Kurangnya Sumber Daya Manusia: Kekurangan guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas dapat menghambat penyelenggaraan pendidikan yang efektif.

Konsep kesetaraan atau pemerataan menurut J.Coleman berarti beberapa hal, yaitu: memberikan pendidikan gratis sampai tingkat tertentu yang merupakan titik masuk utama bagi angkatan kerja, menyediakan kurikulum umum untuk semua anak, terlepas dari latar belakangnya, menyediakan sekolah yang sama bagi anak-anak dengan latar belakang bidang yang berbeda-beda, dan memberikan kesetaraan dalam kasih sayang, karena pajak daerah menyediakan sumber

dukungan untuk sekolah.¹⁷ Selain itu upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab pendidikan tidak merata di Indonesia meliputi meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil, memberikan pendasaran untuk menjamin, memberikan dan melindungi hak-hak warga negara khususnya dalam dunia pendidikan sesuai dengan pasal 31 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.¹⁸ Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor tersebut, diharapkan pemenuhan dan pemerataan hak pendidikan di Indonesia dapat meningkat.

Dampak Pendidikan Terhadap Perubahan Sosial

Selain itu Pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan dampak positif terhadap perubahan sosial dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa cara di mana pendidikan dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang positif:

1. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran:

Pendidikan memberikan pengetahuan dan kesadaran akan masalah sosial, hak asasi manusia, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran: Pendidikan memberikan pengetahuan dan kesadaran akan masalah sosial, hak asasi manusia, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan membuat kita sebagai manusia untuk berpikir, menganalisis, serta memutuskan. Menumbuhkan karakter pada diri sendiri juga merupakan tujuan dengan adanya pendidikan, sehingga menciptakan Sumber Daya Manusia yang lebih baik.¹⁹

2. Pembentukan Nilai dan Etika:

Pendidikan berperan dalam pembentukan nilai-nilai dan etika individu. Melalui proses belajar, individu dapat mengembangkan sikap positif, toleransi dan rasa tanggung jawab dalam masyarakat. Pendidikan yang baik mengajarkan nilai-nilai moral yang mendasar, seperti integritas, kejujuran, dan sikap sosial.

3. Pemberdayaan Individu:

Pendidikan menyediakan alat dan keterampilan yang diperlukan bagi individu untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi. Individu yang terpelajar mempunyai lebih banyak kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang layak, berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat.

4. Mengurangi kesenjangan:

¹⁷ James S Coleman, "Equality Of Educational Opportunity," *Equity & Excellence in Education* 6, no. 5 (September 1, 1968): 19–28, <https://doi.org/10.1080/0020486680060504>.

¹⁸ Handoyo and Zulkarnaen, "Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata Di Indonesia."

¹⁹ Yayan Alpian, M.Pd., Sri Wulan Anggraeni, M.Pd., Unika Wiharti., "Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia."

Pendidikan dapat menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan memastikan akses pendidikan yang setara terhadap semua lapisan masyarakat, kesenjangan dalam hal pendapatan dan peluang dapat dikurangi. Hal ini menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

5. Pengembangan Keterampilan Sosial dan Kerja sama:

Melalui keterampilan sosial dalam kerangka pendidikan, individu belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan memahami sudut pandang orang lain. Keterampilan sosial ini penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan responsif terhadap perubahan.

6. Inovasi dan pembangunan Ekonomi:

Pendidikan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berinovasi dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Dengan peningkatan tingkat pendidikan, masyarakat dapat menghasilkan lebih banyak ide-ide kreatif, teknologi baru, dan mengembangkan sektor ekonomi yang lebih maju.

7. Pemberdayaan Perempuan:

Kesetaraan pendidikan antara perempuan dan laki-laki dapat membawa perubahan signifikan dalam masyarakat. Perempuan yang terpelajar memiliki peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan gender, dan memperkuat peran perempuan dalam masyarakat.

Dengan menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan adil, masyarakat dapat mencapai perubahan sosial yang positif dalam jangka panjang. Pendidikan tidak hanya memberdayakan individu untuk mencapai kesuksesan pribadi, tetapi juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan

KESIMPULAN

Hak atas Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang tertuang dalam kebijakan pemerintah yaitu peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Dasar salah satu tujuan utama untuk pembentukan dan pendirian Negara Republik Indonesia adalah hak atas Pendidikan. Pendidikan berperan penting bagi kehidupan Masyarakat dan memberikan dampak perubahan sosial yang baik untuk masa depan. Pemenuhan hak Pendidikan di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai upaya. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Upaya yang dilakukan antara lain yaitu Program wajib belajar dua belas tahun, Bantuan sosial dan beasiswa, Peningkatan infrastruktur Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Akan tetapi, tetap saja perlunya kesadaran setiap individu untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju

khusus nya dalam aspek pendidikan. Pendidikan juga memiliki dampak positif terhadap perubahan sosial, seperti peningkatan pengetahuan, pembentukan nilai dan etika, pemberdayaan individu, mengurangi kesenjangan, pengembangan keterampilan sosial, inovasi, dan pemberdayaan Perempuan. Penulis merekomendasikan agar pendidikan dapat dikembangkan lebih lanjut agar masyarakat menjadi manusia yang berkualitas. Dengan adanya artikel ini, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan artikel yang penulis buat.

REFERENSI

- Abidin, Zainal. "Peluang Dan Tantangan Mea: Kerjasama Pendidikan Indonesia Di Kawasan Asean" 01 (2019): 29–39.
- Angga, Angga, Cucu Suryana, Ima Nurwahidah, Asep Herry Hernawan, and Prihantini Prihantini. "Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Kabupaten Garut." *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 5877–89. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3149>.
- Badan Pusat Statistik. "Badan Pusat Statistik," 2017. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>.
- Coleman, James S. "Equality Of Educational Opportunity." *Equity & Excellence in Education* 6, no. 5 (September 1, 1968): 19–28. <https://doi.org/10.1080/0020486680060504>.
- Handoyo, Ari Dwi, and Zulkarnaen. "Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional* 1, no. 1 (2019): 21–24. <https://bimawa.uad.ac.id/wp-content/uploads/Paper-Seminar-Nasional-2.pdf>.
- Hidayat, Anwar. "Kesenjangan Sosial Terhadap Pendidikan Sebagai Pengaruh Era Globalisasi." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 15–25. <https://doi.org/10.36805/jjih.v2i1.400>.
- Imran, Rizky, Isna Rahayu, Marshanda, and Ayu Aya. "Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Ppendidikan Nasional." *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): hal 143.
- Indy, Ryan. "Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara." *Holistik, Journal Of Social and Culture* 12, no. 4 (2019): 1–18. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/25466>.
- Kurniawati, Fitria Nur Auliah. "Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi." *Academy of Education Journal* 13, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765>.
- Mulyana, Dede, and Sudiar. "Analisis Perubahan Sosial Dan Pembangunan Di MTs YPAK Ciguru - Tinjauan Terhadap Peran Lembaga Pendidikan Dalam Transformasi Sosial Masyarakat." *J-STAF (Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah)* 2, no. 2 (2023): 214–29.
- Octavianti, Fanisyah Salsabila. "Implementasi Konvensi Hak Anak Di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan Bagi Pelajar SMA)." *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 23, no. 1 (2023): 30–37. <https://doi.org/10.24036/pedagogi.v23i1.1476>.
- Rahayu. "Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Siswa SD." *Jurnal Kreatif: Jurnal Kependidikan Dasar*, 2016, 115–19.

<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kreatif/article/view/27831>.

- Sawali, Ahmad, Kaharuddin Kaharuddin, Lukman Ismail, and Nurdevi Bte Abdul. "Pendidikan Dan Perubahan Sosial (Studi Masyarakat Nelayan Pulau Karampuang Kabupaten Mamuju)." *Journal Socius Education* 1, no. 1 (2023): 23–30. <https://doi.org/10.0505/jse.v>.
- Yayan Alpian, M.Pd., Sri Wulan Anggraeni, M.Pd., Unika Wiharti., Nizmah Maratos Soleha. "Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia." *Jurusan Teknik Kimia USU* 1, no. 1 (2019): 66–72.